



PERSOALAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Ahmad Erani Yustika

foto: www

KERANGKA PAPARAN



Pendahuluan

Perkembangan Ketimpangan di Indonesia

Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan

Kinerja Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

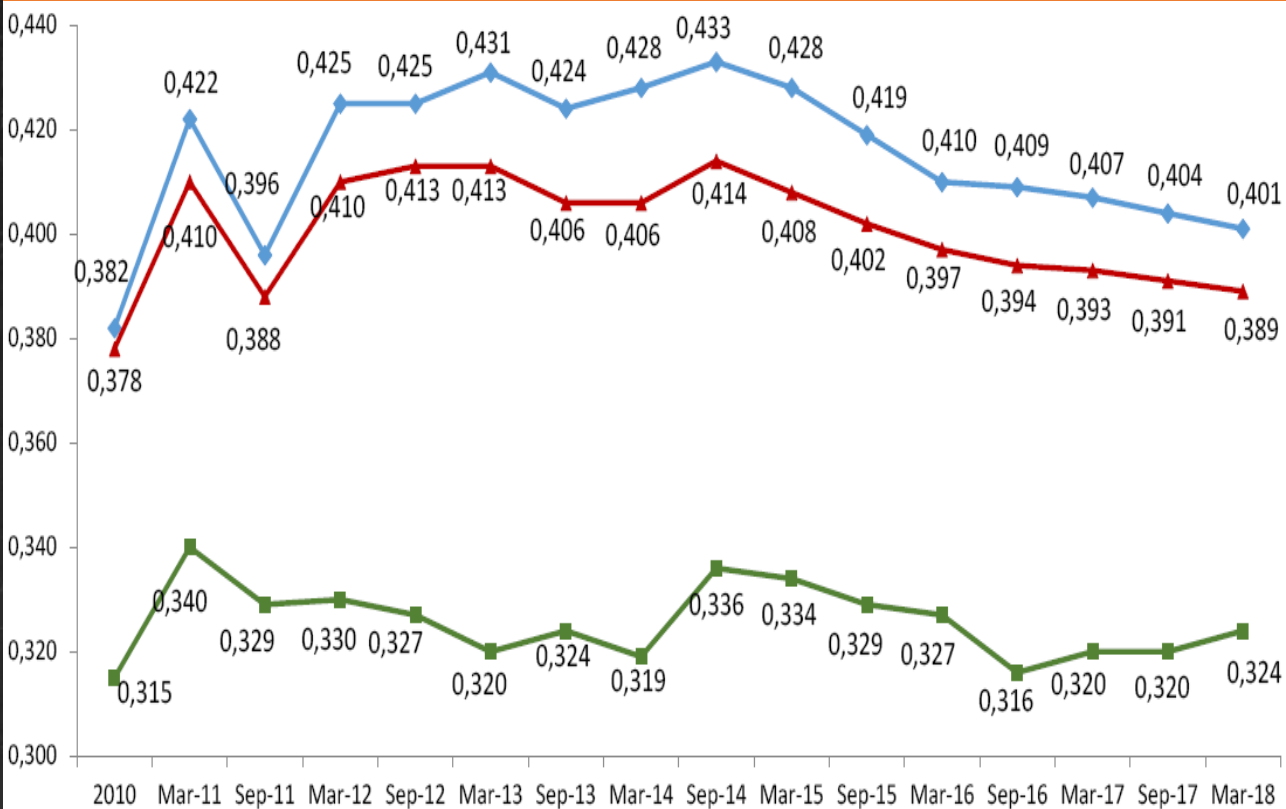
- Ketimpangan merupakan permasalahan mendasar yang ada di Indonesia.
- Pada periode 2005-2014 ketimpangan di Indonesia meningkat tajam.
- Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
- Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah mengerahkan seluruh program, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, untuk pemerataan pembangunan.
- Sehingga, ketimpangan saat ini mulai mengalami tren penurunan.



Perkembangan Ketimpangan di Indonesia

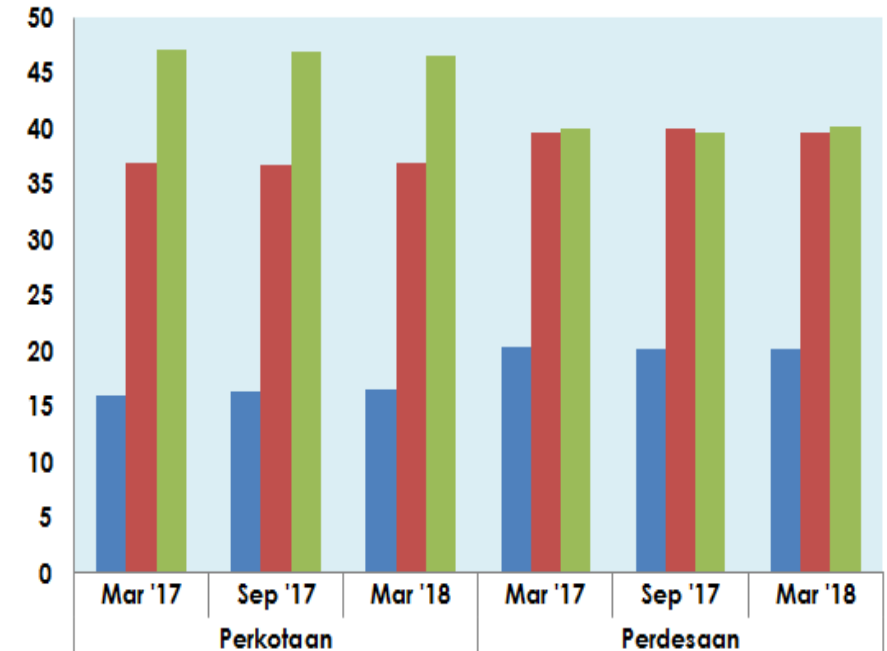
PERKEMBANGAN RASIO GINI DI INDONESIA

Perkembangan Gini Rasio 2010-2018



Sepanjang 2015-2018, rasio gini di Indonesia cenderung menurun, dari 0,408 menjadi 0,389. Rasio gini di perkotaan menurun dari 0,428 menjadi 0,401. Sedangkan di perdesaan, rasio gini sempat menurun dari 0,334 pada Maret 2015 ke 0,316 pada September 2016 dan mulai melonjak lagi mulai Maret 2017 (0,320) hingga Maret 2018 (0,324).

Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia

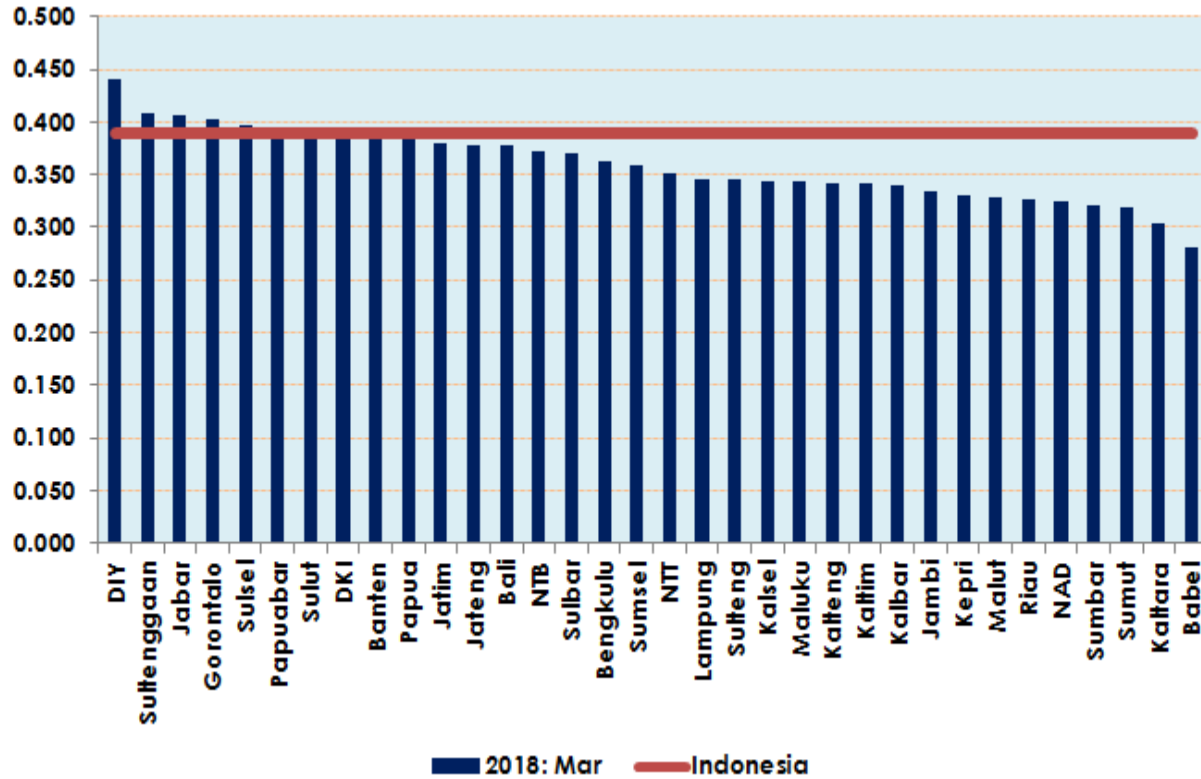


	Mar '17	Sep '17	Mar '18	Mar '17	Sep '17	Mar '18
■ Penduduk 40% Terbawah	16.04	16.33	16.47	20.36	20.25	20.15
■ Penduduk 40% Menengah	36.89	36.74	36.93	39.65	40.04	39.59
■ Penduduk 20% Atas	47.07	46.93	46.6	39.99	39.71	40.26

Kontribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah di perdesaan menurun dari 20,25% pada September 2017 menjadi 20,15% pada Maret 2018. Penurunan kontribusi juga terjadi pada kelompok 40% menengah. Sementara itu, terlihat peningkatan kontribusi pengeluaran 20% penduduk teratas.

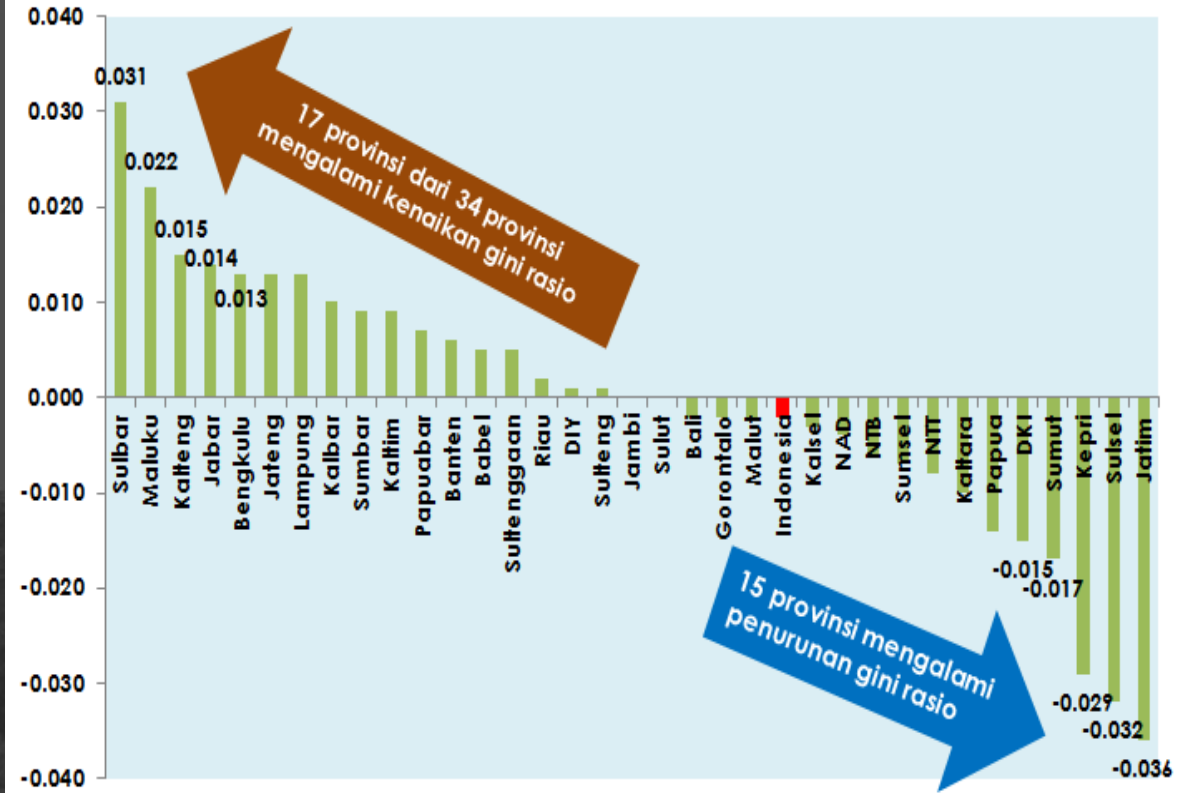
PERKEMBANGAN RASIO GINI MENURUT PROVINSI

Provinsi dengan Rasio Gini di atas Rata-Rata Nasional



Pada Maret 2018, ada 8 provinsi yang memiliki rasio gini di atas rata-rata nasional, yaitu DIY (0,441), Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407), Gorontalo (0,403), Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara (0,394), dan DKI Jakarta (0,394).

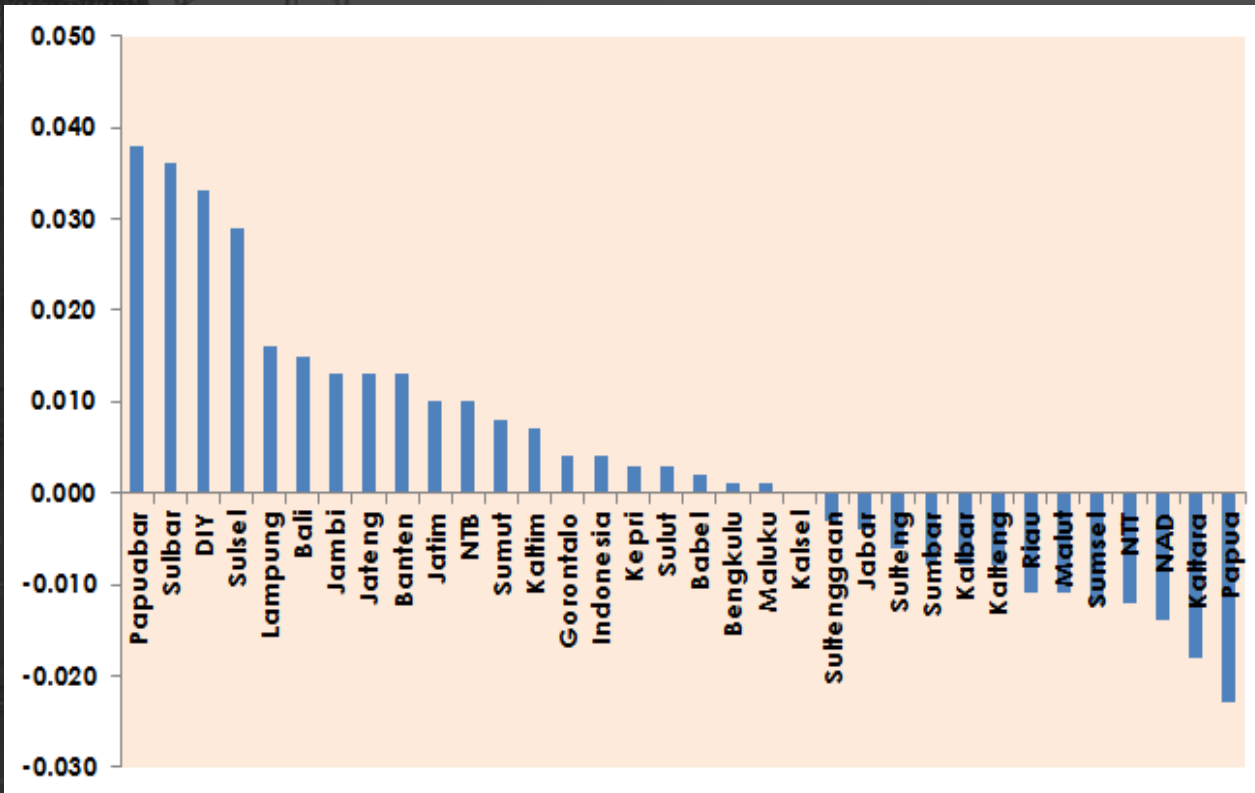
Provinsi dengan Kenaikan dan Penurunan Rasio Gini



Sepanjang September 2017-Maret 2018, sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan rasio gini, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami penurunan rasio gini.

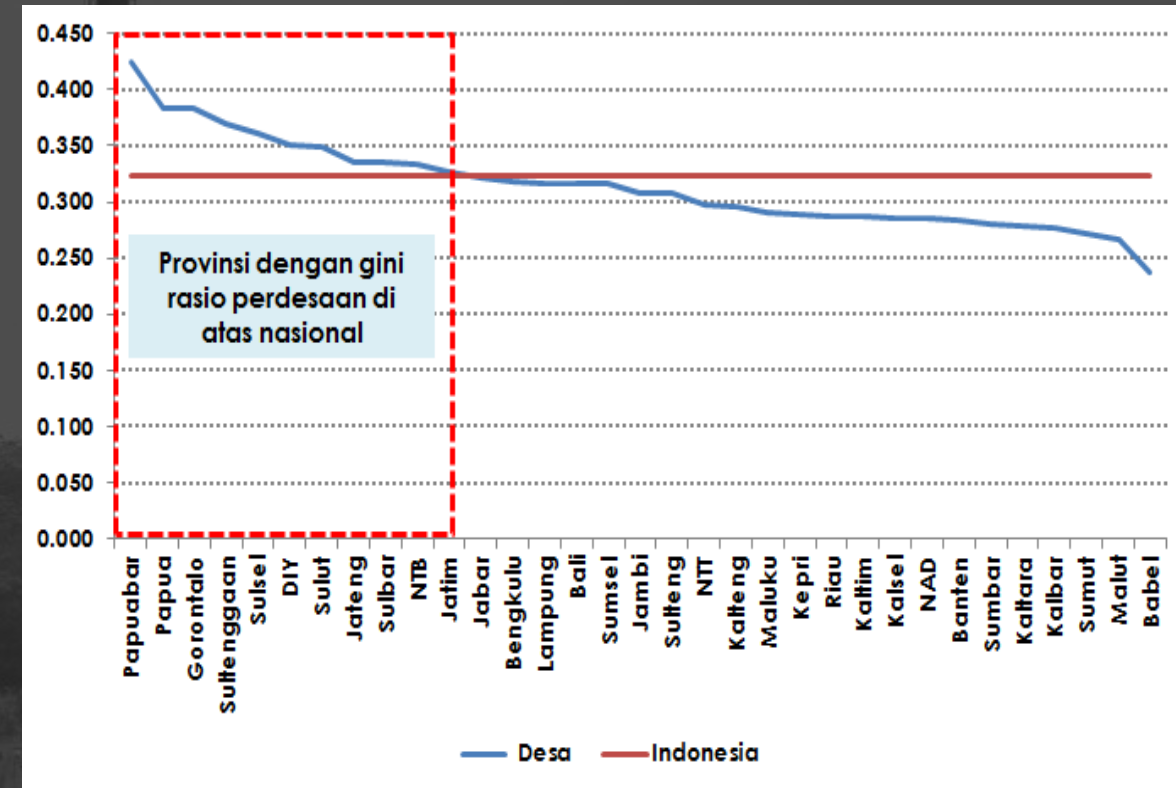
KONDISI KETIMPANGAN (RASIO GINI) DI PERDESAAN

Provinsi dengan Kenaikan dan Penurunan Rasio Gini Desa



Ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan rasio gini di perdesaan sepanjang September 2017- Maret 2018, antara lain Papua Barat sebesar 0,038, disusul Sulawesi Barat (0,036) dan DI Yogyakarta (0,033).

Provinsi dengan Rasio Gini di atas Rata-Rata Nasional



Pada Maret 2018, sebanyak 10 provinsi di Indonesia memiliki rasio gini di atas nasional, termasuk Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Barat.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan

KP RAMBUTAN - CILANDAK
KELOMPOK 28 - 30 KILUAN
GUNAKAN JALUR ALTERNATIF

1945-1969

(Presiden Soekarno)

- Orientasi pembangunan Orde Lama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata.
- Kebijakan reformasi lahan.
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (Pembangunan Nasional Berencana 8 Tahun).

1970-1998

(Presiden Soeharto)

- Inpres desa tertinggal.
- Program bantuan kesejahteraan fakir miskin.
- Program keluarga muda mandiri.
- Program peningkatan peranan wanita.
- Pembinaan karang taruna dan asistensi keluarga miskin.
- Peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan.
- Program pendidikan dan kesehatan.
- Pembinaan usaha kecil-kredit candak kulak.
- Program transmigrasi.
- Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

1998-1999

(Presiden BJ Habibie)

- Program Jaringan Penyelamatan Sosial (JPS).
- Beras subsidi untuk masyarakat.
- Dana untuk pendidikan anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
- Beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu.
- Program padat karya.

1999-2001

(Presiden Abdurrahman Wahid)

- Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin.
- Perbaikan lingkungan rumah tinggal.
- Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.
- Subsidi air bersih.
- Kompensasi kenaikan harga BBM di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan angkutan umum.

2001-2004

(Presiden Megawati)

- Listrik murah untuk rumah tangga miskin.
- Subsidi untuk masyarakat kurang mampu.
- Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro.
- Subsidi pupuk.
- Pelayanan kesehatan.

2004-2014

(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin).
- Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- Program Askeskin/Jamkesmas.
- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)/ Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

2014-2019

(Presiden Joko Widodo)

- Program Indonesia Pintar (PIP).
- Program Indonesia Sehat (PIS).
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Program Dana Desa.
- Program RAPS.

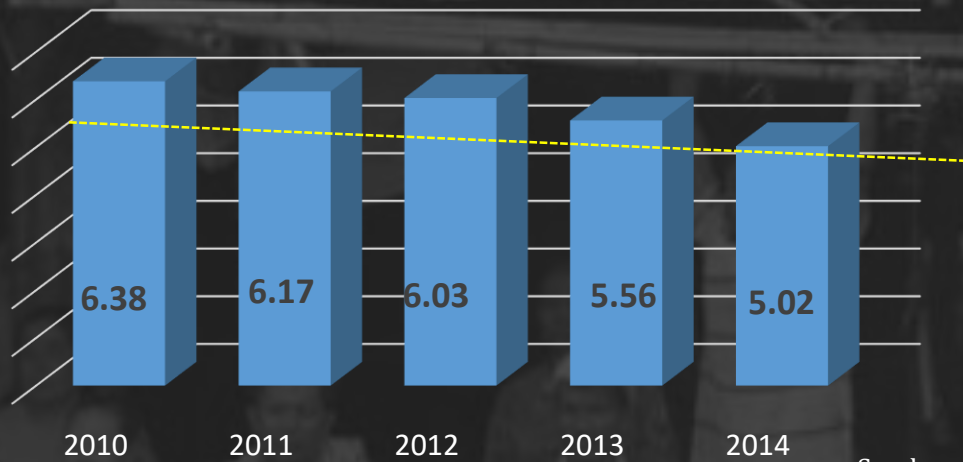
Kinerja Pembangunan Ekonomi

KP RAMBUTAN - CILANDAK
KELEMBATAN 20 - 30 MENIT
GUNAKAN JALUR ALTERNATIF

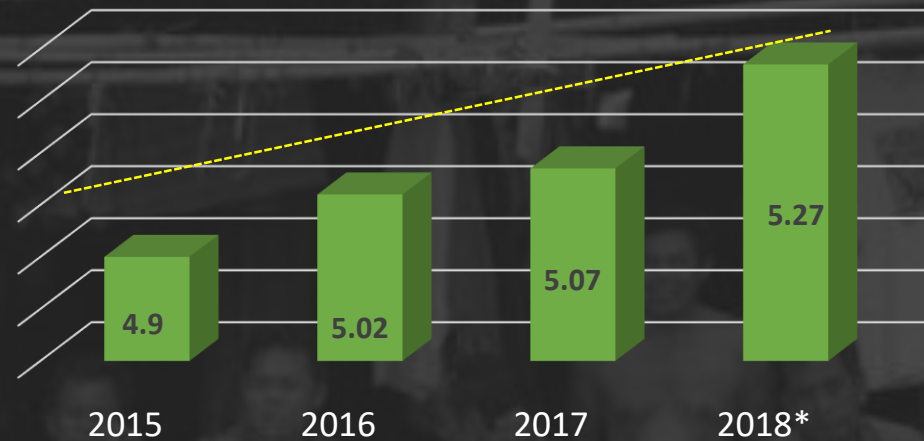
KERANGKA MAKROEKONOMI YANG KOKOH

● Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Membaik

Tren Pertumbuhan Ekonomi 2010- 2014 (%)



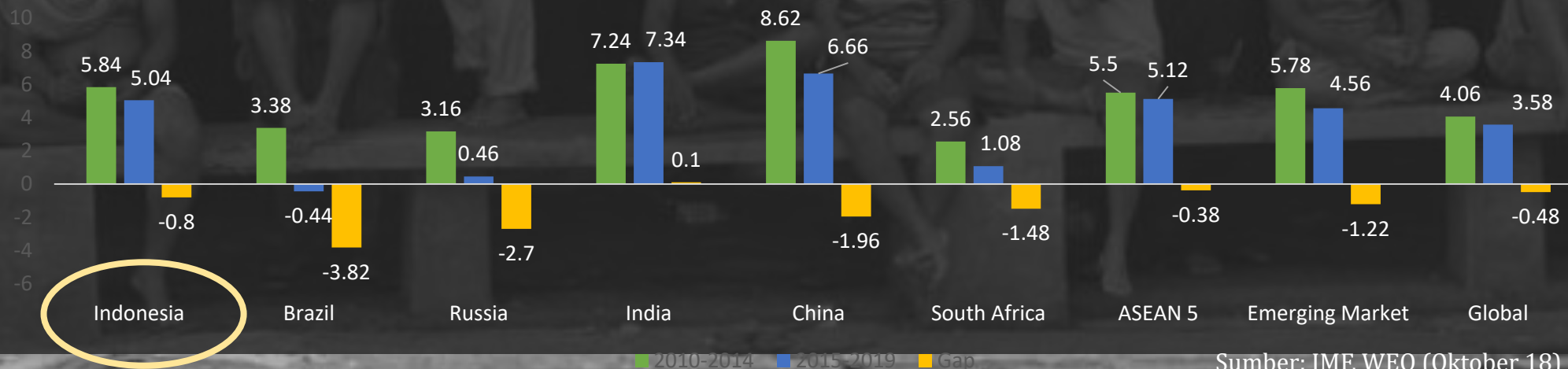
Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2018 (%)



“Kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh positif secara konsisten di tengah pemulihan ekonomi global.”

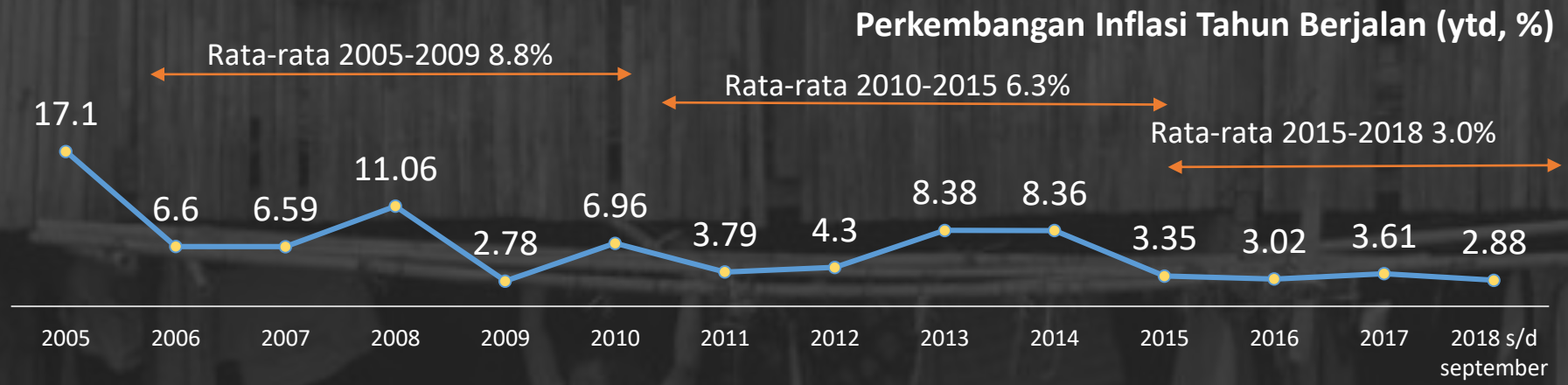
Sumber : BPS (2018)

Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Periode 2010-2014 dan 2015-2019 (%)

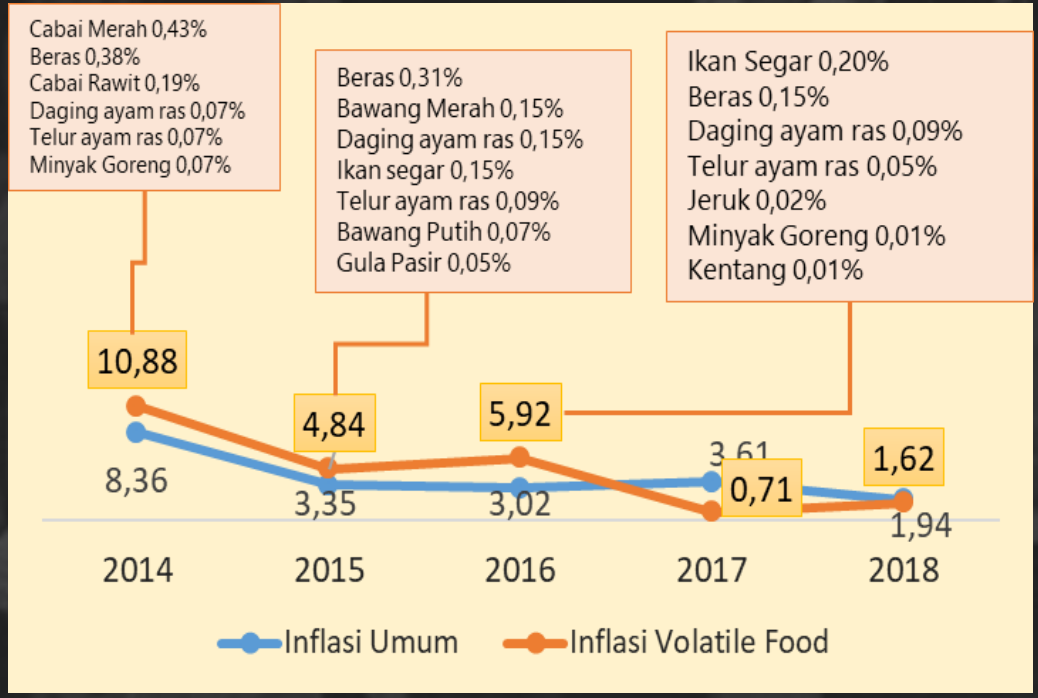


Sumber: IMF, WEO (Oktober 18)

Inflasi Terkendali Sesuai Target



Target dan Realisasi Inflasi dalam RPJMN (%)		
Tahun	Target	Realisasi
2018	3.5	2,88
2017	4.0	3.61
2016	4,0	3,02
2015	4,0	3,35

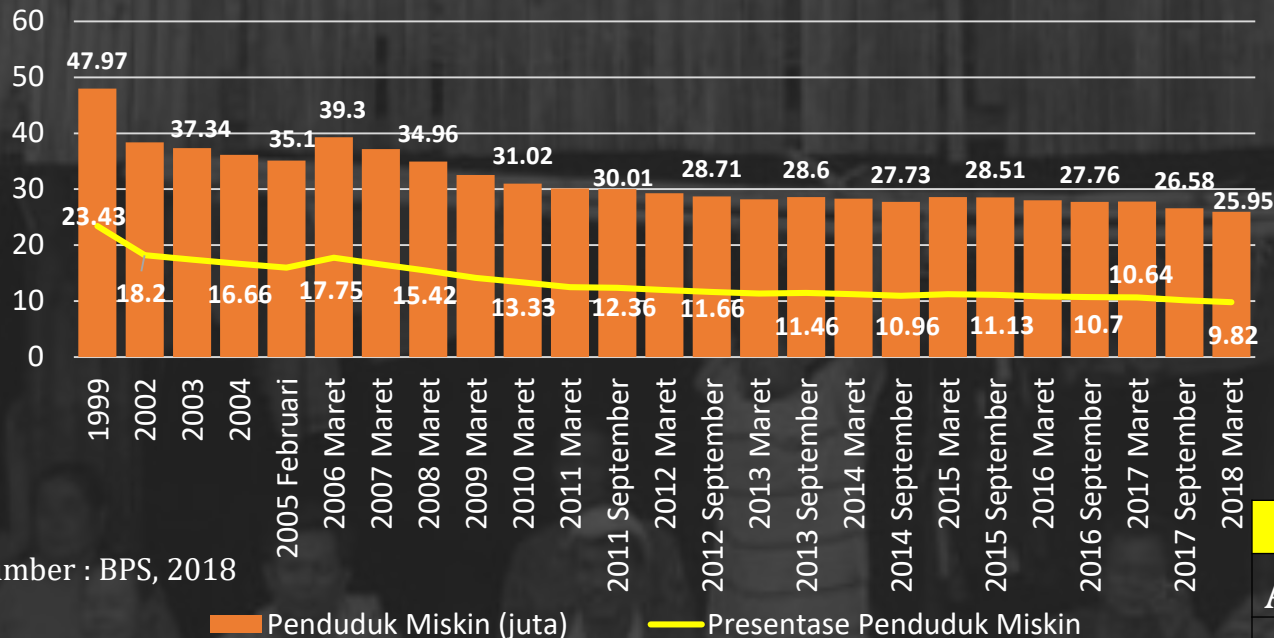


Harga Beras					
2012	Rp	8.055	2015	Rp	10.147
2013	Rp	8.408	2016	Rp	10.685
2014	Rp	8.935	2017	Rp	10.664
Kenaikan Harga Periode 2012-2014 (%)		10,9	Kenaikan Harga Periode 2015-2017 (%)		5,1
Harga Telur					
2012	Rp	17.603	2015	Rp	22.152
2013	Rp	19.012	2016	Rp	23.293
2014	Rp	20.124	2017	Rp	22.734
Kenaikan Harga Periode 2012-2014 (%)		14,3	Kenaikan Harga Periode 2015-2017 (%)		2,6
Harga Daging Sapi					
2012	Rp	76.909	2015	Rp	105.306
2013	Rp	90.402	2016	Rp	113.544
2014	Rp	99.398	2017	Rp	115.932
Kenaikan Harga Periode 2012-2014 (%)		29,2	Kenaikan Harga Periode 2015-2017 (%)		10,1

Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian (2018)

Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Data Kemiskinan, 2011–2018 (Juta Jiwa dan %)

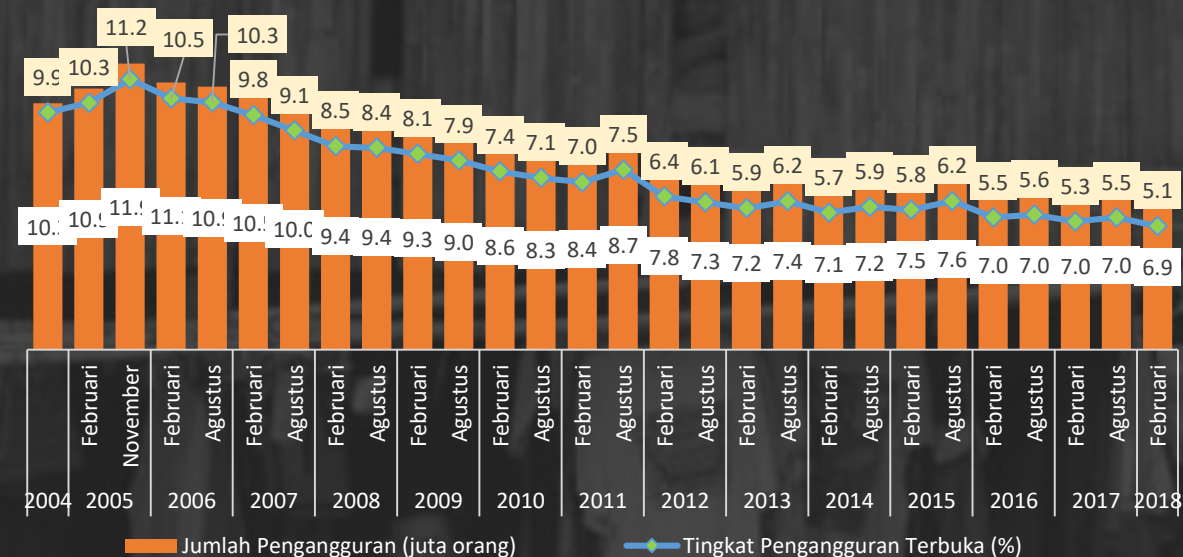


Sumber : BPS, 2018

Perbandingan Pengurangan Kemiskinan

Periode Maret (2011-2014)	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Periode Maret (2015-2018)	Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2011	30.018,9	2015	28.592,8
2012	29.132,4	2016	28.005,4
2013	28.066,6	2017	27.771,2
2014	28.280,0	2018	25.949,8
Penurunan 2011-2014	1.738,9	Penurunan 2015-2018	2.643,0

Data Pengangguran Indonesia, 2004-2018



Sumber : BPS, 2018

Jumlah Pengangguran yang Berkurang (Juta Jiwa)

Agustus 2012	7,35	Agustus 2015	7,56
Agustus 2014	7,24	Agustus 2017	7,04
Berkurang	0,11	Berkurang	0,52

- BPS merilis angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82%. Angka ini merupakan terendah sepanjang sejarah di Indonesia.
- Dalam satu tahun terakhir (Maret 2017-18), pemerintah berhasil mengentaskan penduduk miskin sebanyak 1,82 juta jiwa.
- Pada Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,13%. Angka tersebut berada dalam rentang target RPJMN 2015-2019 sebesar 5-5,2%.
- Efektivitas pengurangan pengangguran lebih baik pada periode 2015-2017 dibanding 2012-2014.

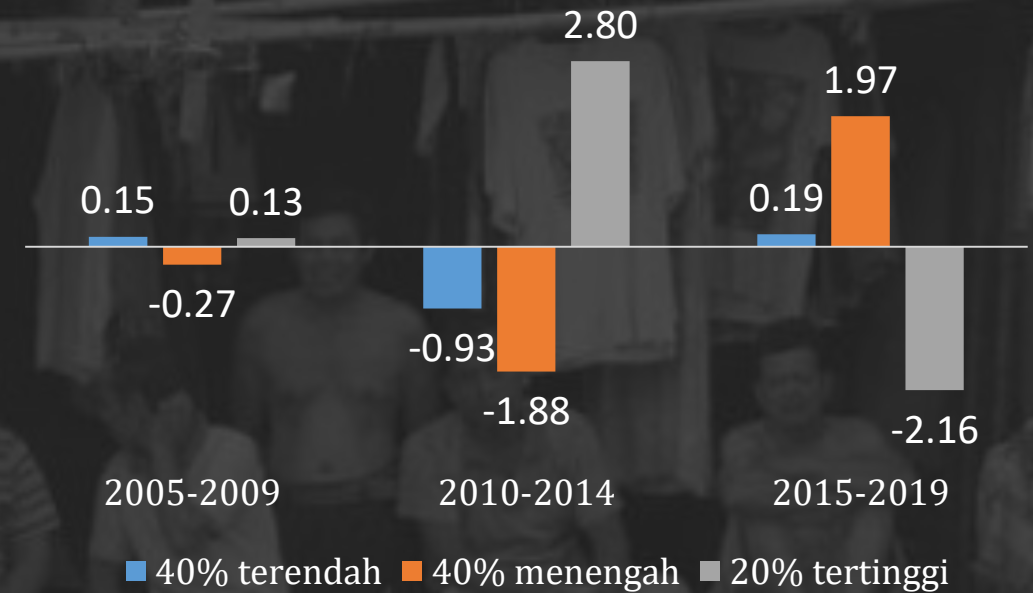
KEADILAN EKONOMI

● Pemerataan Kue Ekonomi Semakin Membaik



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Perubahan Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (%)



- Dalam satu dekade terakhir Indonesia dihadapkan pada permasalahan serius, yaitu melebarnya ketimpangan pendapatan.
- Indeks/rasio gini terus meningkat dari 0,355 pada 2005 menjadi 0,406 pada 2014, setelah sebelumnya mencapai titik tertinggi sebesar 0,413 pada 2013.
- Pada periode 2015-2018, indeks gini berhasil diturunkan secara perlahan menjadi 0,389 pada Maret 2018.
- Distribusi pengeluaran (pendapatan) pun kian merata. Penduduk dengan 40% pengeluaran terendah naik 0,19% dan penduduk 40% menengah juga naik 1,97%. Di sisi lain, penduduk 20% tertinggi justru turun 2,16%.

Bantuan Sosial

Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KIS:

Anggaran: Rp25,5 triliun
Target 92,4 juta keluarga
Capaian 92,2 juta keluarga

KIP:

Anggaran: Rp12,5 triliun
Target 18,9 juta keluarga
Capaian 13,2 juta keluarga

KSS:

Anggaran: Rp17,4 triliun
Target 10 juta keluarga
Capaian 9,8 juta keluarga

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Target Reforma Agraria: 9 juta hektar

Target Perhutanan Sosial: 12,7 juta hektar

Sumber : KSP, 2018

Dana Desa

PENGALOKASIAN DANA DESA



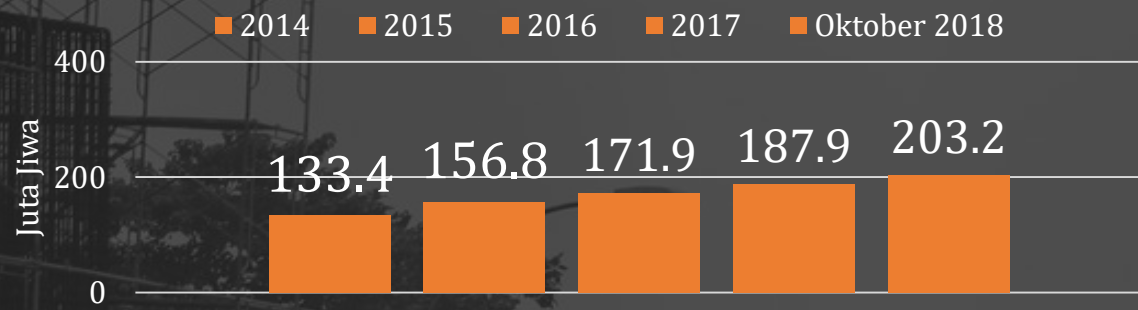
PEMANFAATAN DANA DESA*



Sumber : Kementerian Desa PDTT
*per Agustus 2018

CAPAIAN KINERJA BPJS

PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA

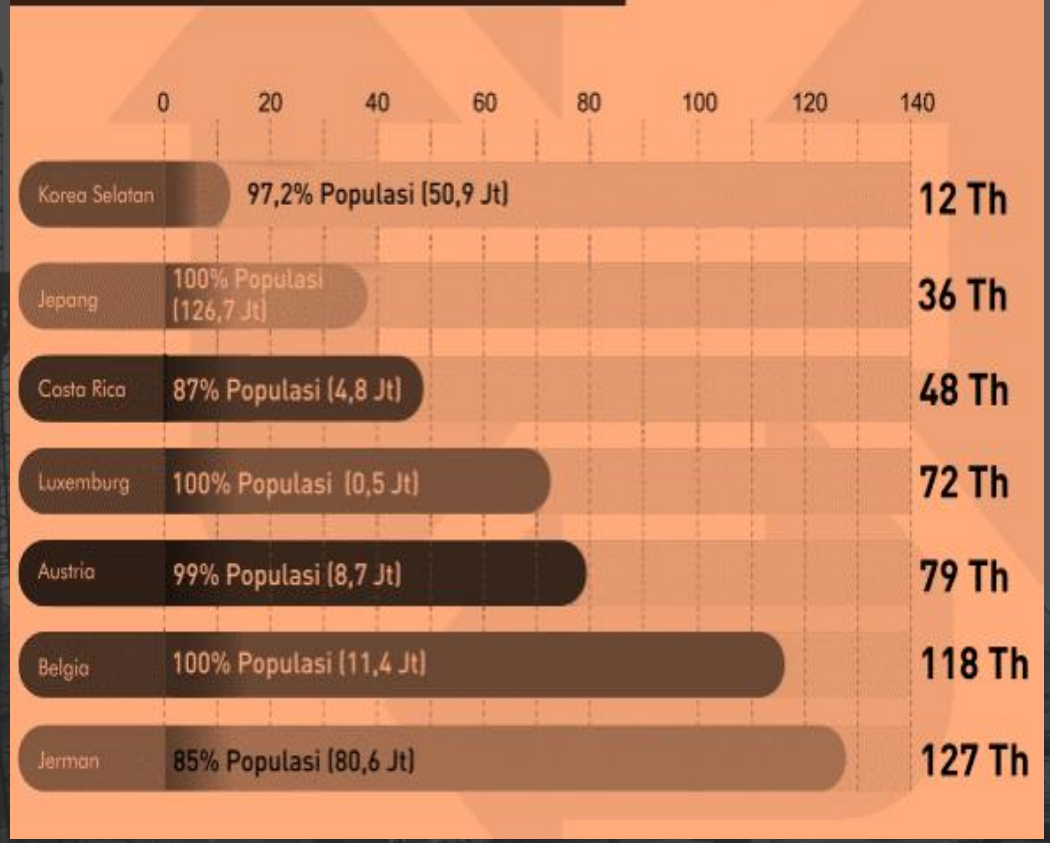


		SEBELUM PROGRAM JKN-KIS	ERA PROGRAM JKN-KIS	
		2013	2014	2015
PEMANFAATAN RAWAT JALAN (Secara Keseluruhan)	Nasional	13.5%	15.4%	17.0%
	Golongan Ekonomi Lemah	12.2%	13.9%	16.0%
PEMANFAATAN RAWAT JALAN (Sektor Swasta)	Nasional	8.7%	10.4%	8.7%
	Golongan Ekonomi Lemah	7.1%	8.5%	7.6%
PEMANFAATAN RAWAT INAP (Secara Keseluruhan)	Nasional	2.3%	2.5%	3.6%
	Golongan Ekonomi Lemah	1.6%	1.8%	2.6%
PEMANFAATAN RAWAT INAP (Sektor Swasta)	Nasional	1.0%	1.1%	1.7%
	Golongan Ekonomi Lemah	0.4%	0.6%	0.9%

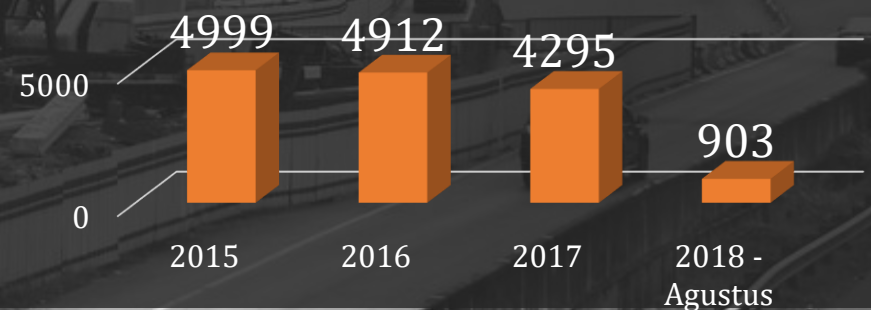
Sumber: Analisis Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia-membelanjakan lebih banyak, lebih tepat dan lebih baik, 2016, *Police brief* Bank Dunia

Sumber : Laporan Keuangan BPJS, 2018 diolah

Perbandingan Jumlah Peserta dengan Negara Lain



Jumlah Absolut Kematian Ibu (orang)



PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

● Peringkat Indeks Logistik dan Perbaikan Iklim Dunia Usaha

Peringkat *Logistic Performance Index* (LPI) Keseluruhan



TAHUN	INDONESIA	FILIPINA	MALAYSIA	VIETNAM	THAILAND	SINGAPURA
2016	63	71	32	64	45	5
2018	46	60	41	39	32	7
	↑ 17	↑ 11	↓ 9	↑ 25	↑ 13	↓ 2

INDONESIA LAYAK INVESTASI

2014



2018

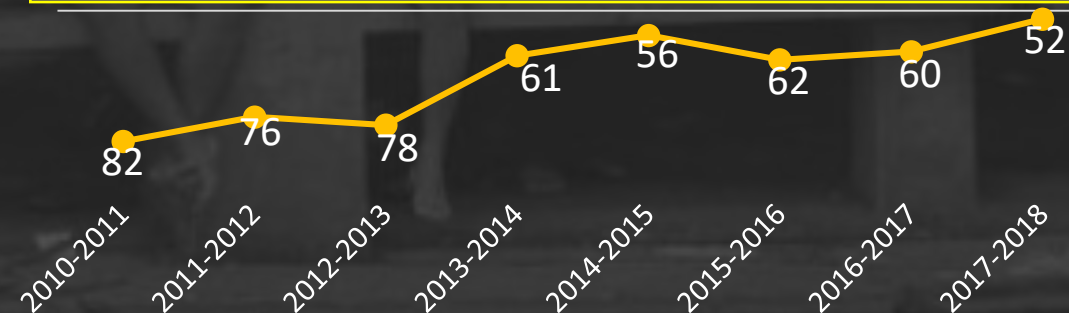
Layak Investasi
Moody's dan Fitch

Tidak Layak Investasi
Standard & Poor

Layak Investasi
Moody's, Fitch, dan Standard & Poor



Peringkat Daya Saing Infrastruktur



Sumatera

Rp545 T

53 Proyek

Kalimantan

Rp481 T

17 Proyek

Sulawesi

Rp308,2 T

27 Proyek

Maluku&Papua

Rp464 T

12 Proyek

Nasional

Rp 1.345,7 T

3 Program dan 12 Proyek

Jawa

Rp995,9 T

89 Proyek

Bali & Nusa Tenggara

Rp9,4 T

13 Proyek

PSN mencakup 15 sektor pada tingkat Proyek
and 3 sektor pada tingkat Program

**PERSEBARAN
DAN
KOMPOSISI
SEKTOR 223
PROYEK DAN 3
PROGRAM
DALAM PSN**



Jalan

69 Proyek



Bendungan

51 Proyek



Kawasan

29 Proyek



Kereta

16 Proyek



Energi

11 Proyek



Pelabuhan

10 Proyek



Pendidikan

1 Proyek



Bandar Udara

7 Proyek



Irigasi

6 Proyek



Pemerataan Ekonomi

1 Program



Smelter

6 Proyek



Teknologi

4 Proyek



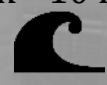
Perumahan

3 Proyek



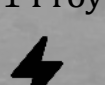
Pertanian/Kelautan

1 Proyek



Tanggul Laut

1 Proyek



Ketenagalistrikan

1 Program



Industri Pesawat

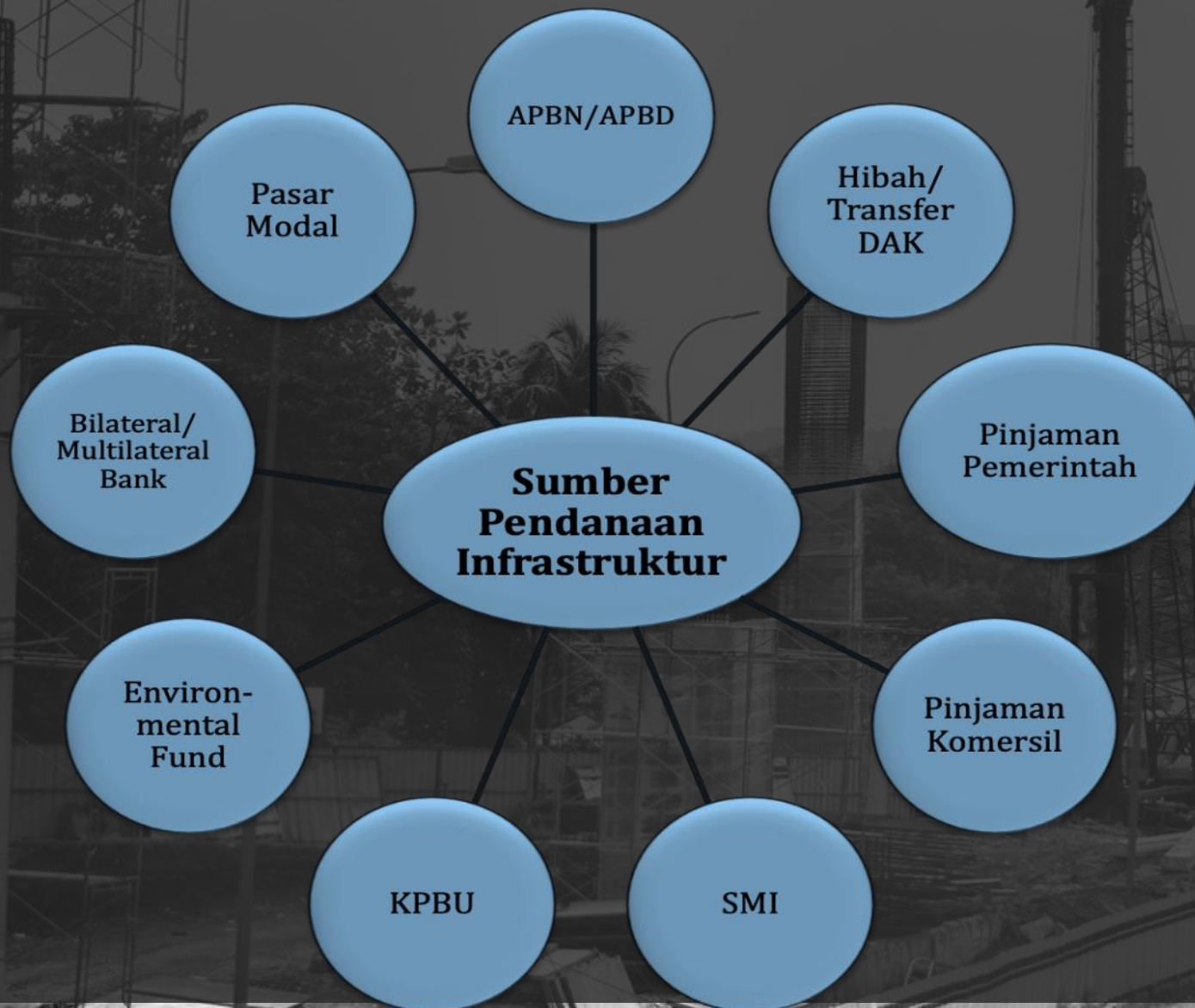
1 Program



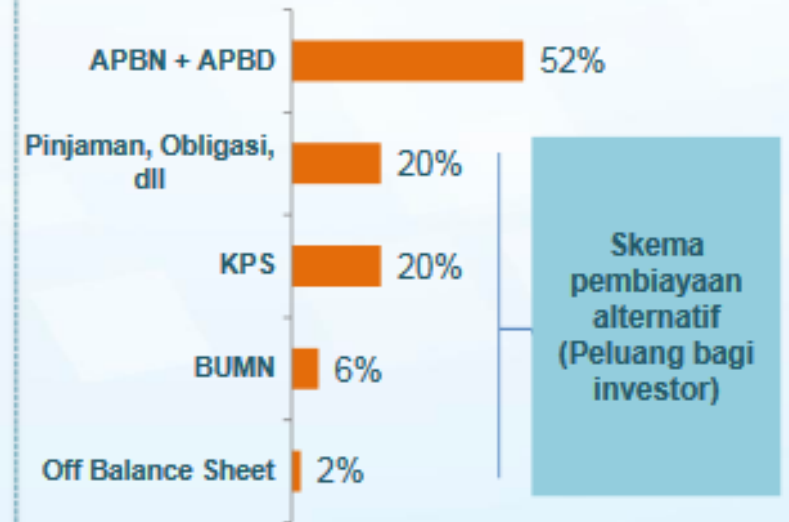
Air Bersih dan Sanitasi

8 Proyek

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Indikasi sumber pembiayaan



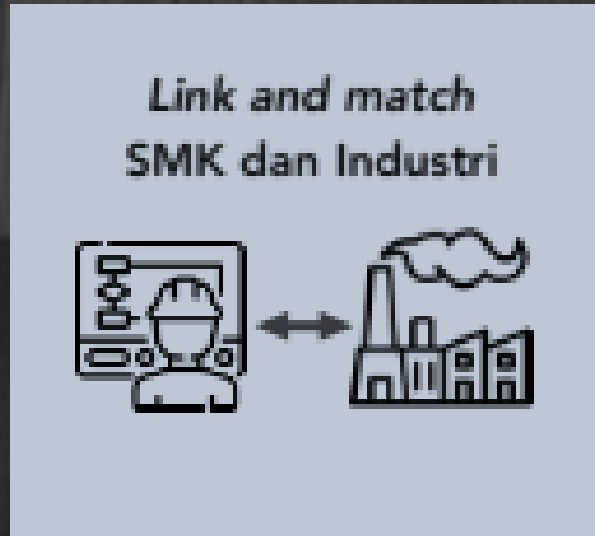
Indikasi kebutuhan investasi

Infrastruktur
Tahun
2015 - 2019

Rp 5.519 T

Sumber: RPJMN 2015-2019

● Revitalisasi Pendidikan Vokasi



Hingga Agustus
2018 ada sekitar
2.700 SMK yang
bekerjasama
dengan industri

Peringkat
97



2015

Peringkat
65



2016

Peringkat
58



2017

Peringkat Pelatihan Vokasi dalam *Global Talent Competitiveness Index*

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sangat penting dalam menyelesaikan masalah pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
- Berbagai upaya pemerintah dalam revitalisasi pendidikan mulai mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dalam laporan *Global Talent Competitiveness Index*, peringkat pelatihan vokasi Indonesia naik 39 peringkat dari 97 pada tahun 2015 menjadi 58 pada tahun 2017.

KEMANDIRIAN EKONOMI

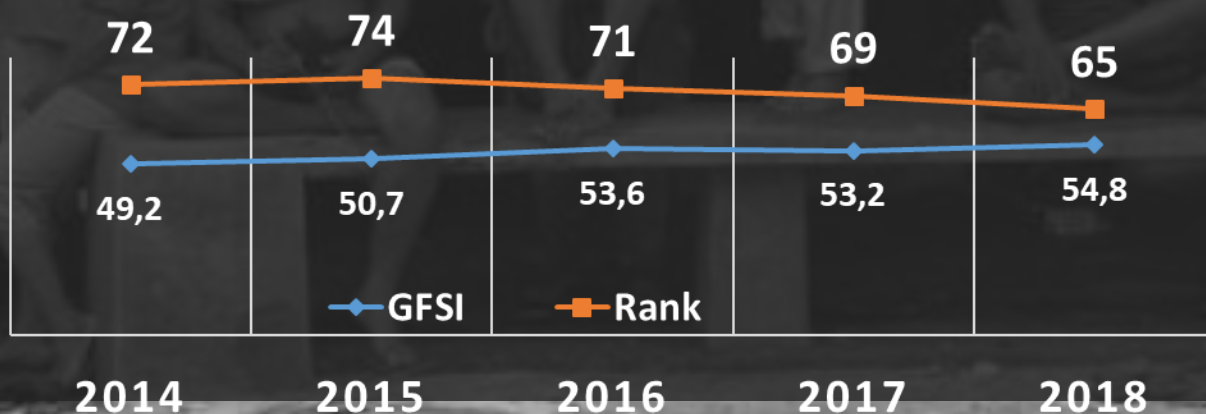
● Indikator Ketahanan Pangan Semakin Membaik

Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan 2018 Negara ASEAN

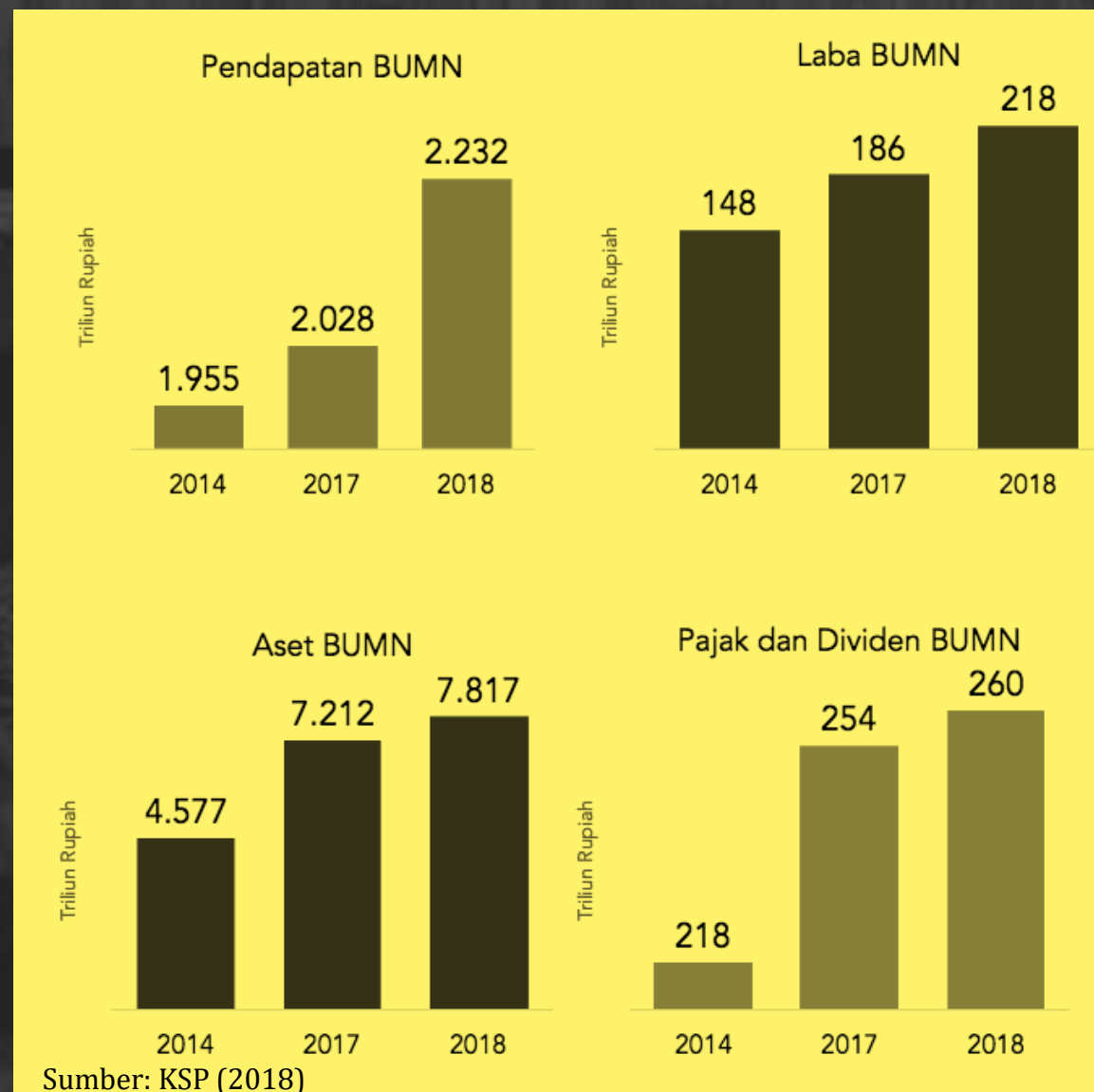
GFSI			Affordability			Availability		
Rank	Negara	Score	Rank	Negara	Score	Rank	Negara	Score
1	Singapore	85.9	1	Singapore	94.3	3	Singapore	81.0
6	Malaysia	68.1	6	Malaysia	71.4	6	Malaysia	64.1
8	Thailand	58.9	9	Thailand	64.5	9	Indonesia	58.2
11	Vietnam	56.0	11	Vietnam	58.9	10	Philippines	55.6
12	Indonesia	54.8	13	Indonesia	55.2	11	Thailand	54.7
14	Philippines	51.5	16	Philippines	46.3	14	Vietnam	53.9
19	Myanmar	45.7	19	Cambodia	39.4	16	Myanmar	51.4
21	Cambodia	42.3	21	Myanmar	37.0	21	Cambodia	47.8
23	Laos	38.3	23	Laos	32.9	22	Laos	45.1

Sumber: The Economist Intelligence Unit.

Indeks dan Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia



● Peran dan Kontribusi BUMN Meningkat



Sumber: KSP (2018)

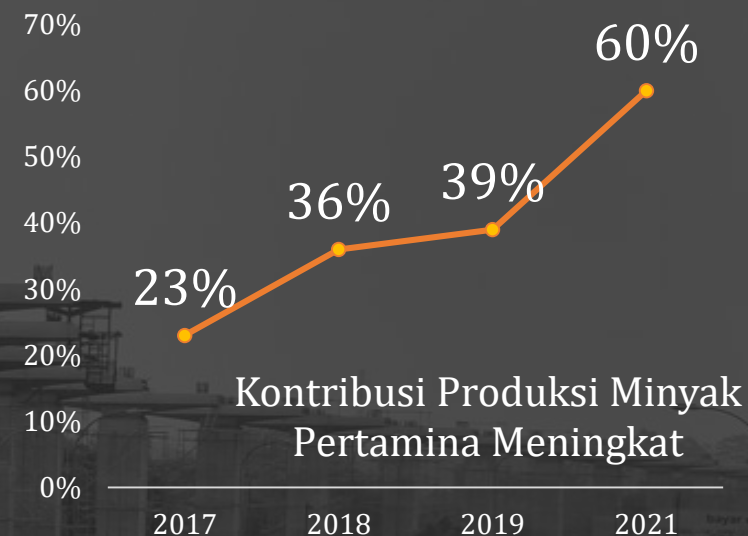
PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS

Pengelolaan Blok Migas Mahakam oleh Pertamina setelah 50 tahun dikelola Total E&P

Blok Rokan

Blok Mahakam

Potensi Pendapatan Negara
Rp825 triliun
(2021 - 2041)



Dampak Positif **Divestasi Freeport**

- ▶ Kelangsungan operasi PTFI (aktivitas ekonomi Papua)
- ▶ Pendapatan negara meningkat
- ▶ Terciptanya multiplier effect (smelter + TKDN)
- ▶ Transfer teknologi pengelolaan tambang paling kompleks
- ▶ Divestasi saham 51% yang lebih efisien
- ▶ Menghindari pengadilan arbitrase

10% DIVESTASI FEEPORT UNTUK PAPUA

● Pengembangan 13 Kawasan Industri Baru



Sumber: Kementerian Perindustrian (2018)

- Periode 2015-2018, Pemerintah telah berhasil mengembangkan 13 kawasan industri (KI) baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di 22 Kota/ Kabupaten di luar Pulau Jawa.

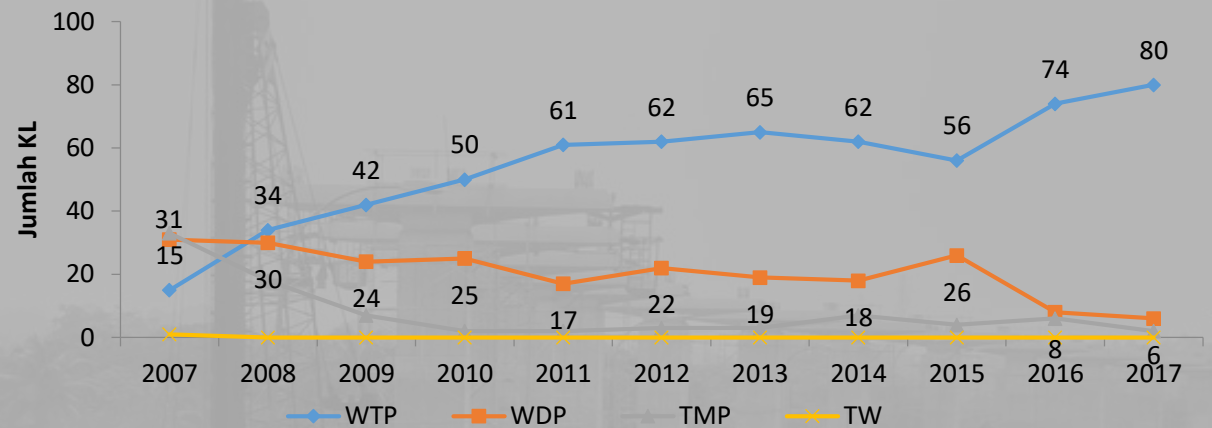
TATA KELOLA PEMBANGUNAN

ALOKASI BELANJA PUSAT UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

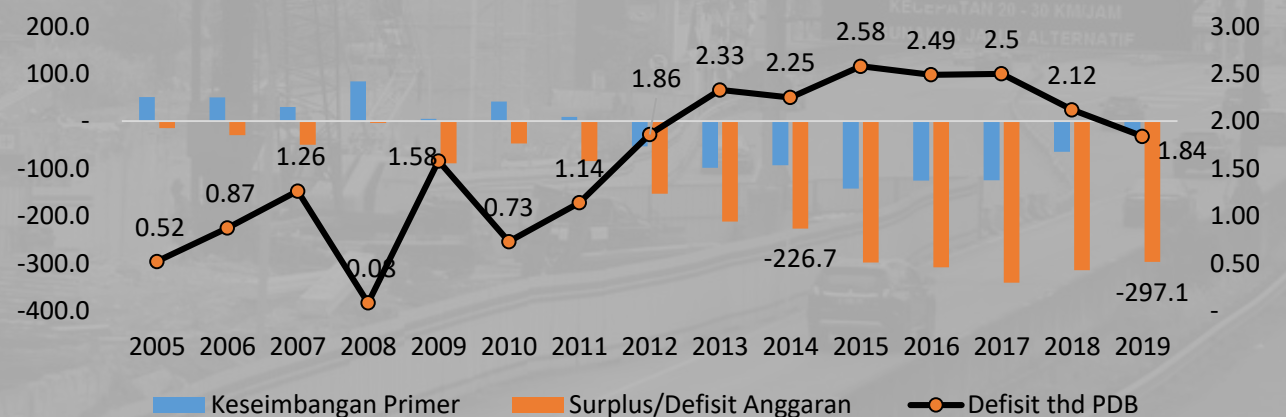
Alokasi Belanja Fungsi terhadap Belanja Pusat (%)	2005-2009	2010-2014	2015-2019
Pelayanan Umum	68.3	65.0	35.7
Pertahanan	4.2	5.8	8.2
Ketertiban dan Keamanan	3.5	2.7	8.3
Ekonomi	8.0	9.1	20.1
Perlindungan Hidup	0.9	0.9	0.9
Perumahan dan Fasilitas Umum	1.7	2.6	1.9
Kesehatan	2.4	1.6	4.0
Pariwisata	0.2	0.2	0.4
Agama	0.3	0.3	0.6
Pendidikan	10.0	11.0	10.7
Perlindungan Sosial	0.5	0.8	9.4

PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH

HASIL AUDIT BPK TERHADAP KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)

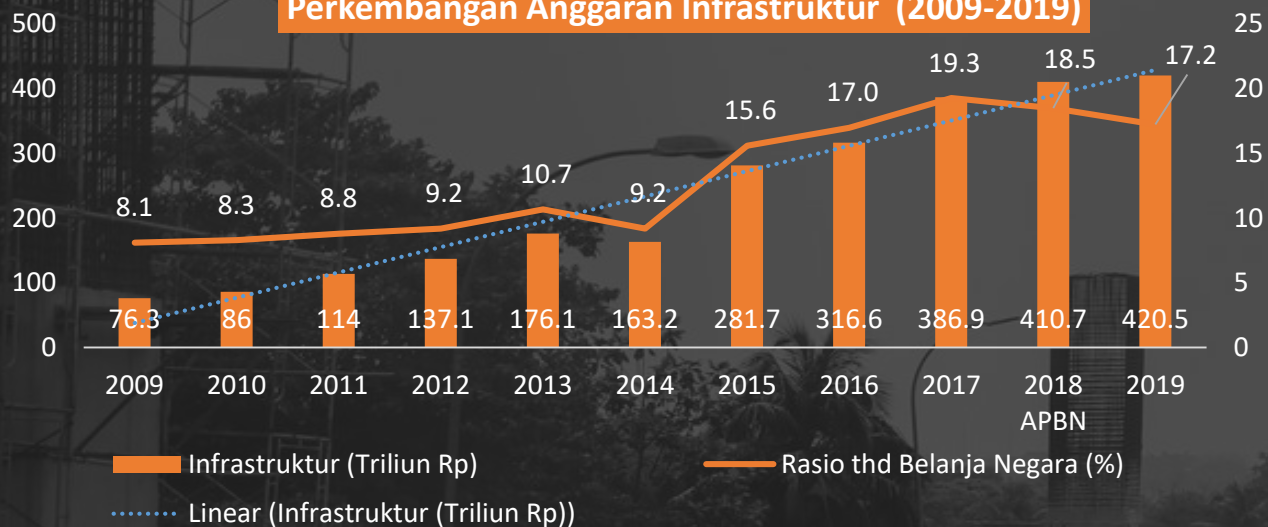


PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN

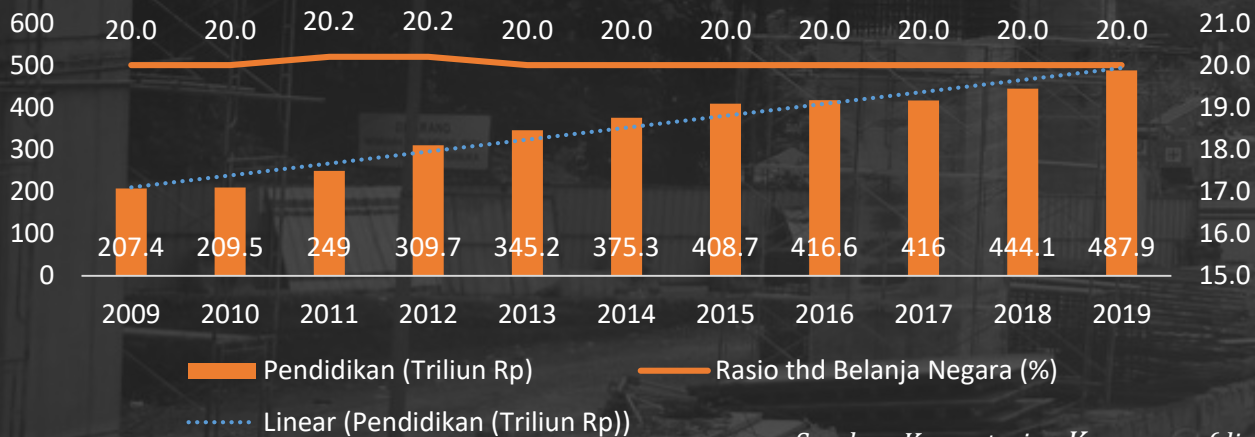


Alokasi Anggaran Prioritas Untuk Pembangunan Berkelanjutan

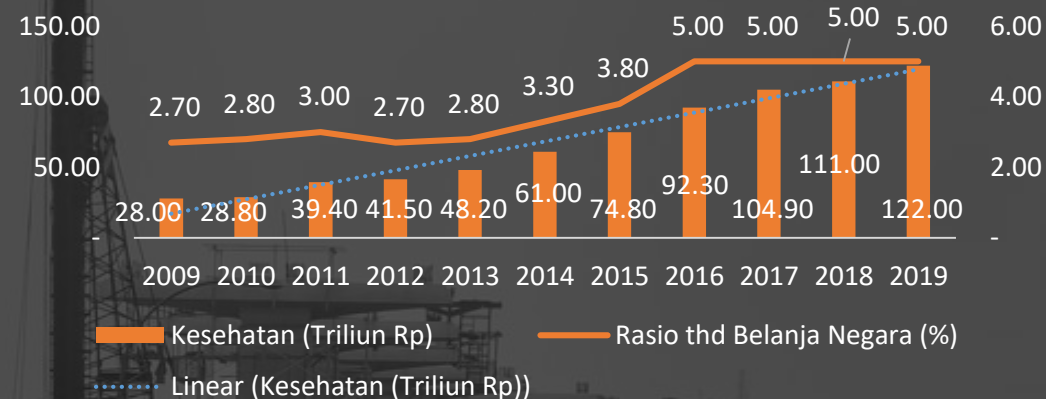
Perkembangan Anggaran Infrastruktur (2009-2019)



Perkembangan Anggaran Pendidikan 2009-2019



Perkembangan Anggaran Kesehatan 2005-2019

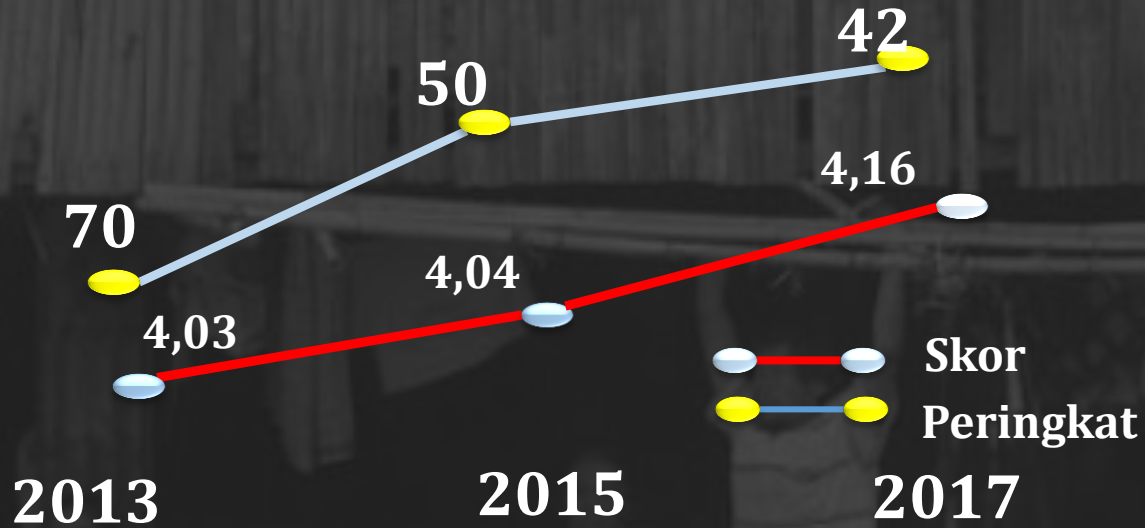


- **Realokasi anggaran subsidi yang tidak produktif** dan penambahan utang diarahkan untuk anggaran prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan dan kesehatan.
- **Anggaran infrastruktur meningkat 438,3%** dari Rp 76,3 triliun di 2009 menjadi Rp 410,7 triliun di 2018.
- **Anggaran pendidikan meningkat 114,1%** dari Rp 207,4 triliun di 2009 menjadi Rp 444,1 triliun di 2018. Rasio anggaran pendidikan juga tetap dijaga sebesar 20% sesuai mandat UU Pendidikan.
- **Anggaran kesehatan meningkat 296,4%** dari Rp 28 triliun di 2009 menjadi Rp 111 triliun di 2018. Rasio anggaran kesehatan untuk pertama kalinya mencapai 5% sesuai mandat UU Kesehatan.

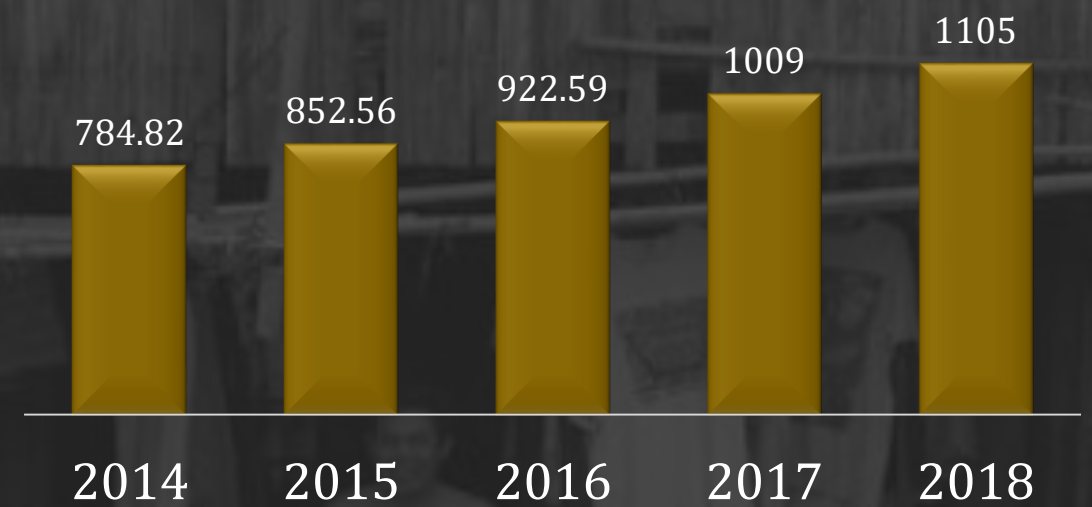
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

● Pengembangan Sumber Ekonomi Baru: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia



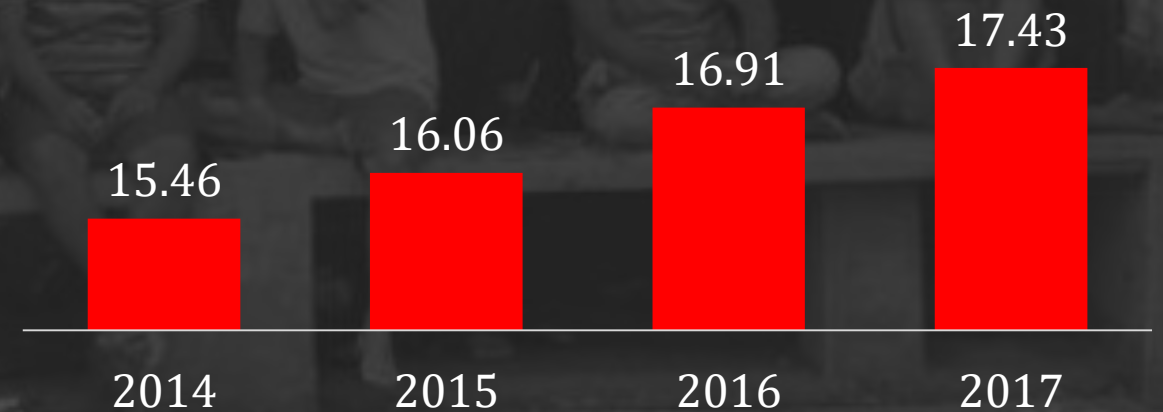
PDB Ekonomi Kreatif (Rp triliun)



Devisa Sektor Pariwisata

No.	Tahun	Devisa (milyar USD)
1.	2012	9,12
2.	2013	10,05
3.	2014	11,16
4.	2015	12,23
5.	2016	13,48
6.	2017	15,20
7.	*2018	17,00
8.	*2019	20,00

Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Ekonomi Kreatif (Juta Jiwa)





Terima Kasih